

Hibah Rp 3,7 Miliar Bermasalah

BALAI KOTA—Dana hibah dan bantuan sosial (bansos) APBD 2013 senilai Rp3,7 miliar rawan dipermasalahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Chrisna Chanis Cara
redaksi@solopos.co.id

Hingga kini Pemkot belum menerima laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan bantuan tersebut.

Kabag Administrasi Kesra Setda Solo Siti Anggraheni Purwanti, saat ditemui wartawan di Balai Kota, Rabu (26/2), mengatakan baru Rp1,3 miliar bantuan hibah bersumber APBD 2013 yang telah dipertanggungjawabkan dari realisasi bantuan senilai Rp5 miliar. Sedangkan hibah senilai Rp3,7 miliar hingga kini belum jelas pertanggungjawabannya. Dana yang masih buram itu diberikan pada sekitar 200 pengelola tempat ibadah maupun lembaga pendidikan nonformal di Solo.

- ▶ Hibah senilai Rp1,3 miliar sudah dipertanggungjawabkan.
- ▶ Penerima hibah kesulitan membuat format pertanggungjawaban

"Dari 349 penerima hibah di 2013, baru 119 yang bikin LPj. Kalau dinominalkan, baru Rp1,3 miliar yang dilaporkan," ujar perempuan yang akrab disapa Anggra ini.

Menurut Anggra, realisasi LPj yang belum menyentuh 50% ini cukup memprihatinkan. Pihaknya mengaku sering mewanti-wanti penerima hibah agar membereskan LPj maksimal tujuh hari setelah pencairan. Anggra khawatir apabila tidak segera dirampungkan, kondisi tersebut bisa menjadi temuan BPK. "Kalau kedhisikan BPK jelas bakal menjadi temuan. Penerima hibah bisa dipanggil," tutur dia.

Dari pengamatannya, LPj yang belum tertagih rata-rata karena penerima hibah kesulitan membuat format pertanggungjawaban. Padahal, pihaknya mengaku telah berulang kali menyosialisasikan format pembuatan LPj pada penerima hibah. Anggra mengklaim konsep LPj juga telah ringkas karena hanya berbentuk laporan empat lembar.

"Bikin proposal berlembar-lembar saja bisa masa bikin LPj tidak," cetus dia.

Disinggung opsi sanksi bagi penerima hibah yang membandel, Anggra mengatakan tidak ada. "Di aturan tidak ada yang menyebut sanksi. Ini yang kadang menyulitkan kami."

Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Honda Hendarto, mendesak Pemkot segera mengklarifikasi LPj hibah yang belum tertagih. Pihaknya khawatir dana hibah senilai Rp500.000 hingga Rp2,5 juta per proposal itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ke depan, pihaknya mendorong Pemkot merangkul pemangku wilayah seperti lurah dan Ketua RT untuk membantu menagih LPj.